



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/39/AA.02/2018, telah dilakukan Pendampingan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah tanggal 28 Juni 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan hasil Pendampingan dimaksud pada huruf a, pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan perubahan atas peraturan Bupati Sekadau Nomor 22 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5239);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pentunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 50)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahunan.

6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau

dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. melakukan evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Keselarasan Kinerja Dari Level Kabupaten ke Level SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) dan II (dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sekadau diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- b. Inspektorat Kabupaten Sekadau melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau.
pada tanggal 2 Juli 2018
BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 32 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
(1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	(1) Laju Pertumbuhan Ekonomi	(1) Meningkatnya Sektor Pertanian	(1) Persentase Pertumbuhan PDRB dari Sektor Pertanian	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Pertanian Th n} - \text{Jmlh PDRB sektor Pertanian Tn n-1}}{\text{Jmlh PDRB sektor Pertanian Tn n-1}} \times 100 \%$	BPS dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
						- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
						- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
						- Dinas Perhubungan
		(2) Meningkatnya Sektor Perdagangan	(2) Persentase Pertumbuhan PDRB dari ssektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Perdagangan Th n} - \text{Jmlh PDRB sektor Perdagangan Tn n-1}}{\text{Jmlh PDRB sektor Perdagangan Tn n-1}} \times 100 \%$	BPS dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
						- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
			(3) Persentase Pertumbuhan PDRB dari sektor Akomodasi, makanan dan Minuman	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Akomodasi makanan dan minuman Th n} - \text{Jmlh PDRB sektor Akomodasi makanan dan minuman Tn n-1}}{\text{Jmlh PDRB sektor Akomodasi makanan dan minuman Tn n-1}} \times 100 \%$	BPS dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			(4) Persentase Pertumbuhan PDRB dari Sektor Transportasi dan Pergudangan	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan Th n} - \text{Jmlh PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Tn n-1}}{\text{Jmlh PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Tn n-1}} \times 100 \%$	BPS, Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
						- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
						- Dinas Perhubungan
		(3) Meningkatnya Sektor Industri	(5) Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB Sektor Industri Th n} - \text{Jmlh PDRB sektor Industri Tn n-1}}{\text{Jmlh PDRB sektor Industri Tn n-1}} \times 100 \%$	BPS dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
						- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
		(4) Meningkatnya Iklim Usaha	(6) Persentase pertumbuhan Koperasi dan UMKM	$\frac{\text{Jumlah koperasi dan UMKM tahun n} - \text{Jumlah Koperasi dan UMKM tahun n-1}}{\text{Jumlah Koperasi dan UMKM s/d tahun n}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi ,Usaha kecil, Menengah dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		(5) Meningkatnya Investasi di Kabupaten Sekadau	(7) Nilai Investasi	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn ini}-\text{Realisasi PMDN thn lalu}}{\text{Realisasi PMDN thn ini}} \times 100 \%$	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		(6) Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Pemerintah Daerah	(8) Persentase jalan kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten kondisi mantap (KM)}}{\text{Total Panjang jalan kabupaten}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan
	(9) Persentase jembatan kondisi baik		$\frac{\text{Panjang jembatan kabupaten kondisi baik (KM)}}{\text{Total panjang jembatan kabupaten yg ada keseluruhan}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan 	
	(10) Persentase Desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat		$\frac{\text{Jumlah desa yg bisa dilalui roda 4}}{\text{Jumlah desa}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Perhubungan 	
	(11) Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi		$\frac{\text{Jumlah desa terhubung}}{\text{Jumlah desa}}$	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 	
(2) Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	(2) Opini BPK	(7) Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	(12) Opini BPK	Opini BPK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	(3) Nilai SAKIP		(13) Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat - Bappeda, Penelitian dan Pengembangan - Sekretariat Daerah(Bagian Organisasi) - Inspektorat
	(4) Indeks RB	(8) Meningkatnya Kualitas Penerapan	(14) Indeks RB	Hasil Penilaian PMPRB Kabupaten	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat - Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) - Sekretariat DPRD - Dinas Komunikasi dan Informatika

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
	(5) Indeks Persepsi Korupsi					- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
						- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	(15) Indeks Persepsi Korupsi		Hasil Survei Persepsi Korupsi Kabupaten	Inspektorat	- Inspektorat	
					- Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	
	(6) Indeks Kepuasan Masyarakat		(16) Indeks Kepuasan Masyarakat	Total nilai survei kepuasan masyarakat SKPD pelayanan publik ----- Jumlah SKPD Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	- Dinas Komunikasi dan Informatika
						- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
						- Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
						- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
						- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas dan RSUD)
						- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						- Badan Pengelola Restribusi dan Pajak Daerah
						- Kecamatan
						- Dinas Lingkungan Hidup
						- Dinas Perhubungan
						- Dinas Komunikasi dan Informatika
						- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
						- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(3) Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Sejahtera	(7) Indeks Pembangunan Manusia	(9) Meningkatnya Kualitas Pendidikan	(17) Angka kelulusan	Jumlah Lulusan pada jenjang SD dan SMP ----- x 100 % Jlh siswa tingkat tertinggi pd jenjang SD dan SMP	Dinas Pendidikan	- Dinas Pendidikan
			(18) Rata-rata Lama sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tdk. Termasuk tahun yg mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yg pernah/ sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yg pernah/ sedang diduduki	BPS dan Dinas Pendidikan	- Dinas Pendidikan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
			(19) Harapan Lama Sekolah	Lamanya Sekolah (dalam tahun) yg diharapkan akan dirasakan oleh anak pd umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yg sama saat ini.	BPS dan Dinas Pendidikan	- Dinas Pendidikan
		(10) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	(20) Usia harapan hidup	Jumlah Penduduk yg mati pada umur tertentu ----- jumlah penduduk pada umur tertentu	BPS dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB - Rumah Sakit Umum Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
		(11) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	(21) Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara x 100%	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		(12) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	(22) Pengeluaran Perkapita :	pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Total Pengeluaran RT ----- Jumlah RT Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita: Total Pengeluaran RT Non Pangan ----- x 100 Total Pengeluaran	BPS dan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	- Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	(8) Angka Pengangguran	(13) Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	(23) Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah Penduduk angkatan kerja ----- x 100 % Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun)	BPS dan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	- Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
			(24) Tingkat Pengangguran terbuka	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja ----- x 100 % Jumlah penduduk angkatan kerja	BPS dan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	- Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	(9) Angka Kemiskinan	(14) Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	(25) Persentase Penduduk Miskin	Jumlah penduduk miskin ----- x 100 % Jumlah penduduk	BPS dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB KINERJA
			(26) Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: □ $G < 0,3$ = ketimpangan rendah □ $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang □ $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi</p>	BPS dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(4) Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang aman, tertib dan harmonis	(10) Angka Kriminalitas	(15) Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	(27) Persentase Penurunan Gangguan terhadap Trantibum	<p>Jumlah Kasus hasil operasi</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah kasus hasil operasi di tambah jumlah gangguan yg terdata</p>	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	- Satuan Polisi Pamong Praja
	(11) Angka Konflik pertahun	(16) Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	(28) Angka konflik per tahun	<p>Jumlah konflik tahun sekarang (n) - jumlah konflik tahun sebelumnya (n-1)</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah konflik tahun sebelumnya (n-1)</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	(12) Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan Anak	(17) Menurunnya Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	(29) Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	<p>Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah perempuan</p>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				<p>Jumlah kasus kekerasan terhadap anak</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anak</p>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 RADIUS
 NIP. 19810910 200803 1 001

II. Keselarasan Kinerja dari Level Kabupaten ke Level SKPD

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	(1) Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,7 %	(1) Meningkatnya Sektor Pertanian	(1) Persentase Pertumbuhan PDRB dari sektor Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Pertanian	1.Persentase peningkatan PDRB dari sektor Perkebunan	1.Peningkatan Penerapan teknologi Perkebunan	1. Penyuluhan penerapan teknologi Pertanian/ perkebunan tepat guna
										2. Perluasan areal tanam
										3. Sosialisasi pengendalian kebakaran lahan dan kebun
									2.Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	4. Pembinaan Perkebunan Besar
										5. Rehabilitasi kebun karet rakyat
										6. Pelatihan budidaya perkebunan
										7. Sertifikasi bibit unggul perkebunan
										8. Pencatatan harga pasar
										9. Pengembangan pembenihan/ pembibitan
										10. Penyuluhan peningkatan produksi perkebunan
									3.Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	11.Pengembangan pengolahan hasil perkebunan
								2.Persentase peningkatan PDRB dari sektor tanaman pangan	4. Peningkatan Penerapan teknologi Perkebunan	12. Pelatihan Statistik Pertanian
										13.Pelatihan pemberantasan Hama Terpadu
										14.Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi/Palawija
										15.Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian
								3. Persentase Peningkatan PDRB dari Sektor Hortikultura	5. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	16.Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan
										17.Pengembangan Pengolahan hasil pertanian
										18.Pembinaan sentra agribisnis sayuran
										19.Promosi atas hasil produksi unggulan daerah
								4.Persentase Peningkatan PDRB dari sektor peternakan	6. Peningkatan PDRB dari Sektor peternakan	20.Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
										21.Pembibitan dan Perawatan ternak
										22.Pengembangan agribisnis peternakan
										23.Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
									7. Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	24.Pengawasan dan Pemeriksaan kesehatan hewan dan daging qurban
									8.Peningkatan pemasaran produksi hasil peternakan	25.Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan penyediaan bahan pangan asal hewan
										26.Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
										27.Penyuluhan pemasaran produksi peternakan
										28.Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
								5. Persentase peningkatan PDRB dari sektor perikanan	9. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	29.Pemanuan hama penyakit ikan, residu, pakan dan obat ikan.
									10. Pengembangan budidaya perikanan	30. Pengembangan bibit ikan unggul
										31. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
										32. Pembinaan dan pengembangan perikanan
									11. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	33. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan
									12. Peningkatan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan	34. Penemuan kelompok pembudidaya ikan/nelayan dan pengolahan hasil perikanan

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
									13. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	35. Kajian Sistem penyuluhan perikanan
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya air	9.Rasio jaringan irigasi/rawa kondisi baik	14. Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya lainnya	36.Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
									15. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	37. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
									16. Pembangunan lurap/talud/bronjong	38. Pembangunan jaringan irigasi
										39. Pembangunan pintu air
										40. Rehabilitasi/pemeliharaan
						Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	10. Persentase koperasi aktif	17. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	41. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
										42. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
										43. Pembangunan sistem informasi perencanaan dan pengembangan perkoperasian
										44. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
										45. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya investasi di sektor pertanian	11. Persentase investasi sektor pertanian	18. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	46. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
						Dinas Perhubungan	Meningkatnya kapasitas dan kuantitas sarana transportasi	12. Rasio Sarana Transportasi Angkutan darat yang memenuhi SPM	19. Peningkatan Pelayanan Angkutan	47. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
								13. Rasio Sarana Transportasi sungai yang memenuhi SPM	20. Peningkatan Pelayanan Angkutan	48. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
					(2) Persentase Pertumbuhan PDRB dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya usaha perdagangan besar dan eceran	14. Persentase pertumbuhan PDRB usaha perdagangan besar dan eceran	21. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	49. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang /Produk Dalam Negeri
									22. Peningkatan dan pengembangan ekspor	50. Pameran terpadu
									23. Peningkatan kerjasama perdagangan internasional	51. Penyiapan database kuota setiap jenis barang dan jasa
								15. persentase penambahan pelaku usaha sektor perdagangan	24. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	52. Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
										53. Penyuluhan disiplin pedagang kaki lima dan asongan
										54. Penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan
										55. Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
									25. rogram resi gudang	56. Sosialisasi pembangunan pergudangan
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya investasi sektor perdagangan besar dan eceran	16. Nilai Realisasi Investasi perdagangan	26. Peningkatan kualitas pelayanan publik	57. Monitoring dan Evaluasi pelayanan perijinan dan non perijinan
					(3) Persentase Pertumbuhan PDRB dari sektor Akomodasi dan makanan dan minuman	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatnya sektor Pariwisata	17. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	27. pengembangan pemasaran pariwisata	58. Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
										59. Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
									28. Program pengembangan kemitraan	60. Kegiatan pengembangan dan penguatan informasi dan database

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
										61. Kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 62. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
									29. Pengembangan destinasi pariwisata	63. Kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan
										64. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek wisata dengan lembaga/ dunia usaha
									30. Program pengembangan kemitraan	65. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
										66. Kegiatan penyuluhan kepariwisataan (sadar wisata) kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, toga tomas dan mitra pariwisata
									31. Program pengembangan destinasi pariwisata	67. Kegiatan pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi
									32. Program pengembangan kemitraan	68. Kegiatan fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya investasi akomodasi dan rumah makan	18. Persentase nilai investasi sektor akomodasi dan rumah makan	33. Peningkatan kualitas pelayanan publik	69. Pendataan perusahaan/kegiatan usaha di Kab Sekadau
						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya mutu pengawasan pangan dan bahan berbahaya	19. Persentase Industri Rumah Tangga (IRT) dan Rumah Makan yang memenuhi standar kesehatan	34. Pengawasan Obat dan Makanan	70. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
					(4) Persentase Pertumbuhan PDRB di sektor Transportasi dan Pergudangan	Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pelayanan Pergudangan	20. Persentase temuan produk tidak layak	35. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	71. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 72. Monitoring stock barang kebutuhan pokok dan barang penting
								21. persentase penggunaan uji ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan tera tera ulang	36. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.	73. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah 74. Pembinaan / operasi penertiban alat ukur/tera ulang 75. Pengadaan Alat Kemetrolgian 76. Pembangunan Laboratorium 77. Penyusunan Perda Pelayanan Tera dan Tera ulang
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Investasi dan kualitas pelayanan perijinan sektor Pergudangan	22. Persentase nilai investasi sektor pergudangan	37. Peningkatan kualitas pelayanan publik	78. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
						Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas dan kuantitas prasarana transportasi	23. Rasio terminal angkutan darat yang memenuhi SPM 24. Rasio dermaga angkutan sungai yang memenuhi SPM	38. Peningkatan pelayanan angkutan 38. Peningkatan pelayanan angkutan	79. Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan jasa angkutan 80. Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan jasa angkutan
			(3) Meningkatnya sektor perindustrian	(5) Pertumbuhan Industri Pengolahan terhadap PDRB	Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya Ekonomi Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM)	25. Persentase pertumbuhan PDRB Usaha Industri Pengolahan	39. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)		81. Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya 82. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri 83. Penyusunan Kebijakan Industri terkait dan industri penunjang kecil dan menengah 84. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
									40. Pengembangan sentra-sentra industri potensial	85. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
								26. Perkembangan Industri Kecil menengah; persentase peningkatan unit IKM	41. peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	86. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas
								27. Persentase peningkatan tenaga IKM	42. Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri	87. Pembinaan kemampuan teknologi industri

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
										88. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
									43. Penataan struktur Industri	89. Penyediaan Sarana dan prasarana klaster industri
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya investasi sektor industri	28. Persentase nilai investasi sektor Industri	44. Peningkatan kualitas pelayanan publik	90. Bimbingan teknis pelayanan perijinan bagi pelaku usaha dan masyarakat
				(4) Meningkatnya Iklim Usaha	(6) Persentase pertumbuhan Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	29. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	48. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	91. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
										92. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
										93. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
										94. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
										95. Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
									49. Program pengembangan sistem pendukung usaha pada UMKM	96. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
										97. Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
										98. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
										99. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
										100. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UMKM	30. Persentase pertumbuhan koperasi dan UMKM	50. Program peningkatan pelayanan perijinan	101. Sosialisasi penyelenggaraan perijinan dan non perijinan
				(5) Meningkatnya Investasi di Kab. Sekadau	(7) Nilai Investasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Nilai investasi di kab. Sekadau	31. Realisasi nilai investasi	51. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	102. Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan realisasi investasi
									52. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	103. Penyusunan kebijakan tentang petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis perijinan
									53. penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	104. Penyelenggaraan pameran investasi dan promosi potensi daerah
									54. peningkatan promosi dan kerjasama investasi	105. Penyusunan cetak biru pengembangan penanaman modal
				(6) Meningkatnya kapasitas infrastruktur dan Aksesibilitas pemerintah daerah	(8) Persentase jalan kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan Kabupaten	32. Persentase Jalan dengan kondisi mantap	55. Pembangunan Jalan dan Jembatan	106. Perencanaan pembangunan jalan
										107. Pembangunan jalan
									56. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	108. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
										109. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
						Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas dan kuantitas prasarana transportasi	33. Rasio rambu lalu lintas yang memenuhi SPM	57. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	110. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan
					(9) Persentase Jembatan kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jembatan Kabupaten	34. Persentase jembatan dengan kondisi baik	58. Pembangunan jalan dan jembatan	111. Perencanaan pembangunan jembatan
										112. Pembangunan jembatan

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	12	13	14	15	16	
									59. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	113. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
										114. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
						Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana Transportasi Darat	35. Persentase Ketersediaan Prasarana perhubungan	60. Pengendalian dan pengamanan lalulintas	115. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Jembatan
				(10) Persentase Desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	36. Persentase Desa yang dapat dilalui kendaraan roda empat	61. Pembangunan Infrastruktur perdesaan		116. Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
										117. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan
									62. Tanggap darurat jalan dan jembatan	118. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
										119. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	37. Persentase Perencanaan Pembangunan Desa yang terakomodir dalam perencanaan pembangunan.	63. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	120. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Desa
						Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas dan kuantitas prasarana transportasi	38. Rasio terminal bongkar muat yang memenuhi SPM	64. Pembangunan sarana prasarana perhubungan	121. Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
									65. Pembangunan sarana prasarana perhubungan	122. Kegiatan Pembangunan Dermaga Steigher Mini
				(11) Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya Jaringan Komunikasi dan Informatika	39. Persentase Desa yang terhubung dg Jaringan Telekomunikasi	66. Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi		123. pembangunan warung informasi masyarakat
										124. pemeliharaan rutin/berkala peralatan teknologi informasi
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	40. Persentase Perencanaan Pembangunan Desa yang terakomodir dalam perencanaan Pembangunan Kabupaten	67. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	125. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Desa
2.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	(2) Opini BPK	WTP	(7) Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	(12) Opini BPK	Inspektorat	Meningkatnya kapabilitas APIP	41. Level Kapabilitas APIP	68. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	126. Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Pegawai (Belanja Pegawai)
									69. Program Pelayanan administrasi perkantoran	127. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
									70. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	128. Kegiatan Pembangunan gedung kantor
										129. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / operasional
										130. Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor
										131. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
									71. Program Peningkatan disiplin aparatur	132. Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan
									72. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	133. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
										134. Kegiatan Diklat Teknis Pembentukan Auditor
										135. Kegiatan Diklat Teknis Penjenjangan Auditor
										136. Kegiatan Diklat Teknis Pembentukan P2UPD
										137. Kegiatan Diklat Teknis Penjenjangan P2UPD
									73. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	138. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
										139. Kegiatan Penyusunan Standar Operasional SKPD

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
									74.Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	140.Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
										141. Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
										142.Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
										143.Kegiatan Reviu RKA SKPD
										144.Kegiatan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan
										145.Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemkab
										146.Kegiatan Pengendalian, monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
										147.Kegiatan Pemeriksa Administrasi dan Fisik Proyek APBD
										148.Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
										149.Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
										150.Kegiatan Rapat koordinasi pengawasan daerah
										151.Kegiatan Verifikasi LHKPNLHKASN
										152.Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
										153. Kegiatan Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)
										154.Kegiatan PMPRB
						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal	42. Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	75 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	155. Pengembangan Sistem Informasi
										156. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
										157. Pembangunan Sistem Jaringan Informasi Keuangan Daerah
							Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	43. Persentase Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan yang dipatuhi	76 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	158 Penyusunan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah
										159. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
										160. Penyusunan KUA PPAS
										161. Pengendalian Anggaran Daerah
										162. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD
										163. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD
										164. Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD
										165. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
										166. Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan penatausahaan keuangan Daerah
										167. Pengendalian Penatausahaan Keuangan Bendahara Daerah
										168. Validasi dan Pelaporan kas Daerah
										169. Evaluasi, Pelaporan dan Peningkatan pelayanan Perbendaharaan
										170. Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan Gaji PNS
										171. Penyusunan Analisa Standar Belanja
										172. Sensus Barang Milik Daerah
										173. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
										174. Penyusunan Regulasi regulasi tentang pengelola keuangan dan barang milik daerah
										175. Revaluasi / appraisal aset/barang Daerah

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
		(3) Nilai SAKIP	BB		(13) Nilai SAKIP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	meningkatnya Kualitas Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	44. Nilai Perencanaan Kinerja	77. Perencanaan Pembangunan Daerah	176. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 177. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Pemembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 178. Penetapan RPJMD 179. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 180. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 181. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 182. Penyusunan rancangan rencana kerja pemda (RKPD-P)
										183. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
							Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	45. Nilai Pengukuran Kinerja	78. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 79. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	184. Penyusunan Data Kinerja 185. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Instansi pemerintah	46. Nilai pelaporan Kinerja	80. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	186. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 187. Penyusunan Perjanjian Kinerja 188. Asistensi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKIP SKPD
						Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas SKPD	47. Nilai rata-rata SAKIP	81. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 82. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	189. Kegiatan Reviu LKIP Pemkab 190. Kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD 191. Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik 192. Kegiatan Penyusunan LAKIP 193. Kegiatan Evaluasi SAKIP 194. Kegiatan Reviu SAKIP 195. Kegiatan Asistensi Peningkatan Kinerja Daerah 196. Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa 197. Kegiatan Asistensi Pengelolaan Dana BOS 198. Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 199. Evaluasi berkala temuan hasil Pengawasan (kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD)
						Badan Perencanaan Pembangunan daerah Penelitian dan Pengembangan.	5. Meningkatnya Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	48. Nilai Capaian Kinerja	83. Perencanaan Pembangunan Daerah	200. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 201. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 202. Penetapan RKPD 203. Penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah perubahan (RKPD-P)
		(4) Indeks RB	B	(8) Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	(14) Indeks RB	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Terwujudnya sistem dan Mekanisme kerja dan organisasi serta pola pikir dan budaya kerja aparatur lebih baik	49. Nilai Managemen Perubahan	84. Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Aparatur	204. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 205. Sosialisasi dan Internalisasi Road map 206. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
										207. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Meningkatnya efektifitas pengelolaan Peraturan Perundang-undangan	50. Nilai Penataan Peraturan Perundang-undangan	85. Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	208. Penyusunan Rencana kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
										209. Legislasi Rancangan Peralurnn Perundang-undangan
										210. Fasilitasi sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
										211. Publikasi peraturan perundang-undangan
										212. Monev produk hukum
										213. Pengkajian dan penelahaan keputusan Bupati
										215. Pengkajian dan penelahan perbup
						Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah	51. Persentase Produk Hukum Daerah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	86. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	216. Pembahasan rancangan Raperda
										217. Rapat-rapat Paripurna
						Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Meningkatnya Efesiensi dan Efektifitas organisasi secara proporsional	52. Nilai Penataan dan penguatan organisasi	87. Penatan Daerah Otonomi Baru	218. Fasilitasi pematapan SOTK pemerintah otonom baru
										219. Evaluasi Pelaksanaan Tupoksi
										220. Penataan Oorganisasi Perangkat Daerah
							Meningkatnya Efesiensi dan Efektifitas Sistem, proses dan prosedur kerja	53. Nilai Penataan Tataaksana	88. Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Aparatur	221. Fasilitasi Penyusunan dan Verifikasi Standar Operasional Prosedur
										222. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
						Dinas Komunikasi dan Informatika			89. Pengembangan Komunikasi informasi dan media massa	223. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
									90. Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah	224. Layanan akses internet dan intranet Pemerintah Daerah
						Sekretariat Daerah (Bagian Oeganisasi) dan Badan Kepegawauan dan Pengembangan SDM	5. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur	54. Nilai Penataan Sistem Managemen SDM	91. Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Aparatur	225. Penyusunan Instrumen Anjab dan Analisis Beban Kerja PNS
										226. Penyusunan Evaluasi Jabatan
										227. Penyusunan Formasi PNS Kab Sekadau
										228. Penyusunan standar Kompetensi
										229. Pemetaan Potensi PNS
										230. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
										231. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
										232. Seleksi Penerimaan Calon PNS
										233. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
										234. Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
										235. Pemberian Pertimbangan Penjatuhan Hukum disiplin PNS
										236. Penempatan PNS
										237. Fasilitasi Penyelesaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
										238. Fasilitasi Pensiun PNS
									92. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	239. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
										240. Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
						Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) dan Bappeda litbang	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	55. Nilai Penguatan akuntabilitas	93. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	241. Bimtek Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
										242. Penyusunan Pedoaman Akuntabilitas Kinerja

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
										243.Pemutahiran Data Kinerja
										244. Pengelolaan Sistem Pengukuran Kinerja dan perencanaan berbasis Elektronik
										245. Bimtek Perencanaan
										246. Asistensi Penyusunan Renstra
						Inspektorat	Meningkatnya Sistem pengendalian intern SKPD	56. Jumlah SKPD memiliki Sistem Pengendalian	94. Program Peningkatan disiplin aparat	247. Kegiatan Pengadaan mesin / kartu absensi
										248. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
										249. Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
									95. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	250. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern SKPD
										251. Kegiatan Reviu Kepatuhan Terhadap SOP
										252. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan
										253. Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran responship gender
										254. Kegiatan Pemeriksaan serentak kas opname
										255. Kegiatan Asistensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
										256. Kegiatan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan
									96. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	257. Kegiatan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Internal
										258. Kegiatan Evaluasi SPIP
									97. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	259. Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
										260. Kegiatan Diklat Teknis Pembentukan Auditor.
										261. Kegiatan Diklat Teknis Perjenjangan Auditor
										262. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
										263. Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran responship gender
										264. Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa
										265. Evaluasi Pelayanan Publik
										266. Rapat koordinasi pengawasan daerah
						Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	57. Nilai Peningkatan kualitas layanan publik	98. Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Aparatur	267. Penyusunan Laporan IKM
										268. Fasilitas Penyusunan SPP
										269. Penyusunan standar pelayanan minimal
		(5) Indeks Persepsi Korupsi			(15) Indeks Persepsi Korupsi	Inspektorat	Meningkatnya Pemnyelenggaraan Pemerintah yang bersih	58. Persentase Rekomendasi Selesai	99. Program Pelayanan administrasi perkantoran	270. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
										271. Kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan
										272. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
										273. Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
										274. Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
								60. Persentase pengaduan selesai	100. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	275. Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda
										276. Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa
										277. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
										278. Kegiatan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
										279. Kegiatan Pengamanan Laporan Gratifikasi
										280. Kegiatan Monev Aksi Pencegahan Korupsi
										281. Kegiatan Verifikasi Pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
										282. Kegiatan Penilaian Internal Zona Integritas
										283. Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan
										284. Kegiatan Penanganan Whistle Blower System
										285. Kegiatan Sosialisasi pencegahan korupsi
						Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Meningkatnya penataan produk Hukum Daerah	61. Persentase produk Hukum Daerah yang di tindak lanjuti	101. Penataan Peraturan Perundang-undangan	286. Penyuluhan Hukum Terpadu
										287. Sosialisasi Produk Hukum
										288. Raker Pungli
						Sekretariat DPRD	Optimalnya fasilitasi peran dan fungsi DPRD	62. Persentase Pelaksanaan Jaringan Aspirasi Masyarakat/Reses oleh DPRD	102. Persentase pengawasan terhadap pembangunan daerah	289. Kunjungan Kerja
										290. Rapat alat kelengkapan dewan
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa	63. Presentase desa yang tertib administrasi	103. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	291. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan
										292. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
						Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya peningkatan pelayanan berbasis E-Governance	64. Persentase pengadaan barang dan jasa secara Elektronik	104. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	293. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
								65. Presentase pengaduan layanan pengadaan secara elektronik	105. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	294. Fasilitasi layanan pengadaan secara elektronik
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan Daerah	66. Persentase pemuktahiran konten sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dan sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan	106. Pengembangan data dan Informasi	295. Penyusunan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
								67. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		296. Penyusunan sistem informasi monitoring evaluasi kinerja pembangunan (SIMEKBANG)
										297. Penyusunan dokumen hasil kajian
		(6) Indeks Kepuasan Masyarakat			(16) Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	68. Indeks Kepuasan Masyarakat	105. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	298. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
						Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	69. Indeks Kepuasan Masyarakat	106. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	299. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
										300. Siaran melalui media radio tentang informasi perijinan dan penanaman modal
										301. Pengelolaan penanganan pengaduan perijinan
									107. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	302. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
									108. Optimalisasi Teknologi Informasi	303. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
										304. Pengelolaan Perijinan dan non perijinan
									109. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	305. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
										334. Pendidikan Kursus
							2.Meningkatnya AMS	86. Angka Melanjutkan	126. Wajib Belajar 12 Tahun	335. Beasiswa Transisi
										336. Sosialisasi dan Advokasi Pendidikan
							3.Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	87. Rasio Sekolah.Penduduk	127. Wajib Belajar 12 Tahun	337. Pembangunan USB
										338. Pembangunan Ruang Kelas Belajar
							4.Menurunnya Angka putus sekolah	88. Angka Putus Sekolah	128. Wajib Belajar 12 Tahun	339. Beasiswa Retrieval
										340. Pendidikan Gratis bagi siswa miskin
				(10) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	(20) Usia harapan hidup	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang optimal	89. Persentase pengunjung yang mendapatkan pelayanan kesehatan	129. Upaya kesehatan masyarakat	341. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
									130. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung puskesmas/pustu dan jaringannya	342. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
						RSUD	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang optimal	90. Persentase pengunjung yang mendapatkan pelayanan kesehatan	133. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	343. Kemitraan peningkatan kualitas dokter
						Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya konversi sumber daya alam	91. Persentase luas lahan yang di konversi	134. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	344. Kemitraan pengonatan lanjutan bagi pasien rujukan 345. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
										346. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				(11) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	(21) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	92. Indeks Pencemaran Air	135. Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	347. Pemantauan Kualitas Lingkungan
										348. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan
									136. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup.	349. Kegiatan Penyusunan SLHD dan SPM Lingkungan
										350. Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
										351. Kegiatan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
								93. Indeks pencemaran Udara	137. Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	352. Pemantauan Kualitas Lingkungan
								94. Persentase Industri/ Kegiatan yang memenuhi kelentuan pengelolaan Lingkungan Hidup		353. Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan
										354. Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
										355. Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL
										356. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
										357. Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
										358. Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
										359. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
										360. Kegiatan Monitoring Pemantauan Perijinan Amdal dan UKL/UP
						BPBD	Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran	95. Persentase Pemandaman Kebakaran	138. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	361. Sosialisasi norma, standar prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
										362. Diklat pertolongan pencegahan kebakaran
										363. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
										364. Pengadaan Sarpras
										365. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
								96. Jumlah Titik Hot Spot	139. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	366. Penangan bencana kabut asap
						Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat	97. Persentase RT yang menerapkan pola hidup sehat	140. Upaya Kesehatan Masyarakat	367. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkatnya perumahan yang berkualitas dan sehat	98. Persentase perumahan yang layak huni	141. Pengembangan perumahan	368. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
									142. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	369. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
									143. Pengelolaan Areal Pemakaman	370. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya penyediaan air bersih	99. Persentase RT pengguna air bersih	144. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	371. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
										372. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.
										373. Pengembangan sistim distribusi air minum.
				(12) Meningkatnya daya beli Masyarakat	(22) Pengeluaran Perkapita	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas Sumber Daya tenaga kerja	100. Rasio tenaga kerja terampil dan produktif	145. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	374. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
										375. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
										376. Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan Kerja
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya pengelolaan potensi lembaga kemasyarakatan untuk penguatan perekonomian masyarakat desa	101. Persentase masyarakat desa yg berwirausaha	146. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	377. Pelatihan keterampilan teknologi tepat guna
	(8) Tingkat Pengangguran	1,80%	(13) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	(23) Tingkat partisipasi angkatan kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	102. Rasio tenaga kerja yang di tempatkan	147. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	148. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	378. Pendidikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
										379. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
						Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pengarusutamaan Gender	103. Indeks pembangunan gender (IPG)	149. peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dim pembangunan	380. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
								104. Indeks pemberdayaan gender (IDG)		381. Fasilitasi perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja
										382. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender
										383. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
				(24) Tingkat Pengangguran terbuka	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	105. Tingkat pengangguran	150. Peningkatan kesempatan kerja		384. Penyebarluasan informasi bursa kerja
					Dinas Koperasi, Usaha kecil, menengah dan Perdagangan	Meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil	106. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	151. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM		385. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
										386. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
										387. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
										388. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
										389. Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
								152. Program pengembangan sistem pendukung usaha pada UMKM		390. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
										391. Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
										392. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
										393. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah
										394. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
						Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Sumber daya perempuan	107. Tingkat Partisipasi perempuan di bidang pemerintahan	153. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	395. Pembinaan organisasi perempuan
								108. Tingkat partisipasi perempuan di bidang ekonomi kreatif		396. Pemeran hasil karya perempuan di bidang pembangunan
		(9) Angka Kemiskinan	5%	(14) Meningkatnya taraf hidup Masyarakat	(25) Persentase Penduduk Miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin	109. Persentase Masyarakat miskin	154. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	397. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	110. Persentase kawasan kumuh perkotaan dan pedesaan	155. Program Pengembangan Kawasan permukiman	398. Pengembangan Permukiman Perdesaan
										399. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
										400. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
								111. Persentase perumahan yang mempunyai sarana dan prasarana utilitas	156. Program Lingkungan Sehat Perumahan	401. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
										402. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
										403. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
										404. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
										405. Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan
									157. Pengembangan data/ Informasi kawasan permukiman	406. Kegiatan Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Perkotaan
										407. Kegiatan Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pengendalian genangan banjir kawasan permukiman perkotaan
										408. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
									158. Pengelmbangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	409. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga
										410. Penyusunan dan updating database pengelolaan air limbah rumah tangga di kawasan permukiman
										411. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
									159. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	412. Kegiatan Penyusunan dan analisis data informasi potensial perdesaan pada kawasan permukiman
										413. Kegiatan Pengembangan kawasan potensial Perdesaan
										414. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
					(26) Indeks Gini	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin	112. Persentase Masyarakat miskin	160. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	415. Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2021	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	SKPD Terkait	Sasaran Strategis SKPD	Indikator Sasaran strategis SKPD	Program	Kegiatan
	1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
										416. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
4.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang aman, terlib dan harmonis	(10) Angka Kriminalitas	0%	(15) Meningkatnya keamanan dan ketertiban	(27) Persentase Penurunan Gangguan terhadap Trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum	113. Persentase penurunan gangguan terhadap Trantibum	161. Pemeliharaan Trantibmas dan tindak kriminal	417. Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan Narkoba 418. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 419. Penyuluhan pencegahan praktek perjudian
		(11) Angka konflik per tahun	0%	(16) Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	(28) Angka konflik per tahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Kesadaran dan peran serta Masyarakat dalam mengantisipasi potensi Konflik	114. Persentase Angka Konflik	162. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal	420. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan sisksmwakarsa di daerah 421. Fasilitasi dan dan pembinaan Forum kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah
		(12) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan	0,17%	(17) Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	(29) Angka kasus kekerasan terhadap perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Perempuan	115. Tingkat Penurunan kasus Kekerasan terhadap Perempuan	163. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	422. Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan 423. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
								116. Persentase Partisipasi Perempuan dalam bidang Sosial, Ekonomi dan Politik	164. Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	424. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
					(30) Angka kasus kekerasan terhadap Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas hidup Anak	117. Persentase anak yang mendapat perlindungan terhadap tindak kekerasan	165. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	423. Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan 424. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
								118. Nilai Pemenuhan Hak-hak Anak	166. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	425. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
										426. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 9810910 200803 1 001